

## Studi Komparatif Pemikiran Karl Marx dan Mohammad Hatta Tentang Eksploitasi Tenaga Kerja Dalam Industrialisasi

Charles Fransiskus Ambarita<sup>1</sup> Dwi susanti<sup>2</sup> Pendeko<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [charlesambarita@unimed.ac.id](mailto:charlesambarita@unimed.ac.id)<sup>1</sup> [dwisusanti.7232441001@mhs.unimed.ac.id](mailto:dwisusanti.7232441001@mhs.unimed.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini membahas pemikiran Karl Marx dan Mohammad Hatta mengenai eksploitasi tenaga kerja dalam konteks industrialisasi. Kajian dilakukan dengan metode library research melalui telaah karya primer dan sekunder dari kedua tokoh, serta literatur terkait kapitalisme, koperasi, dan demokrasi ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karl Marx menilai eksploitasi terjadi karena pengambilan nilai lebih (surplus value) oleh kapitalis, yang menjadikan hubungan antara buruh dan pemilik modal timpang serta tidak adil. Sebaliknya, Mohammad Hatta mengkritik dominasi modal dan menawarkan solusi melalui konsep demokrasi ekonomi serta koperasi sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Pemikiran Marx lebih banyak digunakan sebagai alat analisis kritis terhadap ketimpangan struktural dalam sistem kapitalisme, sedangkan gagasan Hatta relevan sebagai landasan filosofis ekonomi Indonesia sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Keduanya dapat saling melengkapi: Marx sebagai kritik struktural, dan Hatta sebagai solusi konstruktif dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan pada era globalisasi dan Revolusi Industri 4.0.

**Kata Kunci:** Karl Marx, Mohammad Hatta, Eksploitasi Tenaga Kerja, Industrialisasi, Demokrasi Ekonomi, Koperasi

### Abstract

*This study explores the thoughts of Karl Marx and Mohammad Hatta on labor exploitation within the context of industrialization. The research applies a library research method by reviewing primary and secondary sources from both figures, along with literature on capitalism, cooperatives, and economic democracy. The findings reveal that Karl Marx views exploitation as the extraction of surplus value by capitalists, which creates an unequal and unjust relationship between workers and capital owners. In contrast, Mohammad Hatta criticizes the dominance of capital and proposes solutions through the concepts of economic democracy and cooperatives as means to achieve social justice and people's welfare. Marx's ideas serve as a critical analytical tool to address structural inequalities in capitalism, while Hatta's perspectives remain relevant as the philosophical foundation of Indonesia's economy, in line with Article 33 of the 1945 Constitution. Both perspectives complement each other: Marx as a structural critique, and Hatta as a constructive solution for achieving equitable economic development in the era of globalization and the Fourth Industrial Revolution.*

**Keywords:** Karl Marx, Mohammad Hatta, Labor Exploitation, Industrialization, Economic Democracy, Cooperatives



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Sejak era Revolusi industri, industrialisasi telah bertransformasi menjadi kekuatan determinan dalam membangun ekonomi. Industrialisasi menjadi motor penggerak yang membawa perubahan mendasar dalam struktur sosial dan proses produksi. Di Indonesia sendiri sektor industri terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik dari segi jumlah perusahaan maupun tenaga kerja yang diserap. Berdasarkan data BPS dan Kementerian Perindustrian, pada tahun 2023 jumlah tenaga kerja sektor industri di Indonesia mencapai 19,34 juta orang lebih banyak dari pada tahun sebelumnya. Sementara itu, Statistik Ketenagakerjaan Umum Februari 2024 menunjukkan bahwa dari 214 juta penduduk usia

kerja, sekitar 69,80% di antaranya tergolong angkatan kerja, dengan sisanya bukan angkatan kerja. Angka pengangguran terbuka (TPT) secara nasional sedang menjadi sorotan karena peningkatan jumlah tenaga kerja berpendidikan yang belum terserap secara optimal.

Namun, di tengah laju pertumbuhan tersebut, muncul berbagai indikasi eksploitasi tenaga kerja, seperti upah yang rendah atau tidak sesuai amanat regulasi, jam kerja yang melewati batas, pekerja kontrak/aspek outsourcing yang kekurangan jaminan sosial, serta posisi tawar buruh yang lemah dibanding pemilik modal. Kondisi ini mengindikasikan adanya asimetri kekuasaan dalam hubungan industrial yang berakar pada sistem kapitalisme global. Revolusi industri yang melahirkan kapitalisme modern, di satu sisi, mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain juga melahirkan ketimpangan sosial yang semakin melebar (Kusdiana dkk., 2025). Kelas sosial dalam sistem kapitalisme dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya kaum borjuis (pemilik modal), kaum proletary (buruh atau tenaga kerja yang meneri upah), dan tuan tanah. Dalam struktur kapitalisme, kelas sosial terbagi menjadi borjuis (pemilik modal), proletariat (pekerja upahan), dan tuan tanah. Pemilik modal memiliki keleluasaan untuk mengakumulasi keuntungan sebesar-besarnya, sering kali dengan mengorbankan hak dan kesejahteraan tenaga kerja (Reyustina & Legowo, 2023).

Fenomena eksploitasi tenaga kerja ini bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga masalah struktural yang berkaitan dengan ideologi, hukum, dan kebijakan negara. Menurut Karl Marx, eksploitasi merupakan suatu tindakan pencurian dimana nilai lebih (*surplus value*) diambil oleh kaum kapitalis dari kaum buruh. Karl Marx juga berpendapat bahwa eksploitasi merupakan logika kapitalis dalam meningkatkan keuntungan atau akumulasi kapital. Indikasi akan hal ini ditandai oleh sistem upah subsistensi (Kambali, 2020). Konsep kapitalisme bagi Marx merupakan suatu formasi masyarakat kelas dan didistrukturasikan dengan aturan eksklusif, yang mana manusia dikonfigurasi untuk pabrikasi dalam kebutuhan hidupnya (Mubarak, 2021). Di sisi lain, Mohammad Hatta, sebagai Bapak Koperasi Indonesia, menawarkan perspektif alternatif yang sangat relevan dalam menghadapi fenomena eksploitasi tenaga kerja. Hatta berpendapat bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya bertumpu pada akumulasi modal semata, melainkan harus dibangun atas landasan keadilan sosial, partisipasi kolektif, dan kesejahteraan pekerja melalui sistem ekonomi kerakyatan dan koperasi. Menurutnya, pekerja bukan semata objek dalam proses produksi, tetapi subjek yang memiliki hak dan kewajiban dalam kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi hasil produksi agar manfaat ekonomi dirasakan secara lebih merata.

Konsep ekonomi kerakyatan Hatta sangat menekankan tiga dimensi: pertama, nilai kepemilikan bersama atas alat produksi yang mengurangi ketergantungan pada modal besar; kedua, prinsip kebersamaan dan tanggung jawab sosial dalam organisasi ekonomi di mana nilai seperti solidaritas, gotong gelar, dan kerja sama menjadi inti; ketiga, orientasi terhadap kepentingan mayoritas rakyat dan perlindungan terhadap kaum yang rentan, misalnya tenaga kerja informal, pekerja tanpa status tetap, dan kelompok-marginal (Wulandari & Hasan, 2023). Kajian komparatif atas pemikiran Karl Marx dan Moh. Hatta dilakukan untuk melihat dua paradigma berbeda dalam memahami tenaga kerja dan industrialisasi. Berangkat dari kritik tajam Karl Marx terhadap sistem kapitalisme dan Moh. Hatta menawarkan alternatif dalam konsep ekonomi kerakyata. Dalam penelitian menjawab bagaimana pemikiran Karl Marx dan Mohammad Hatta mengenai eksploitasi tenaga kerja dalam industrialisasi, persamaan dan perbedaan pandangan kedua tokoh ekonomi tersebut serta relevansi pemikiran keduanya dalam konteks industrialisasi saat ini.

## **Tinjauan Pustaka dan Kajian Teori**

### **Teori Eksploitasi Tenaga Kerja Karl Marx**

Karl Marx menjelaskan bahwa inti eksploitasi tenaga kerja dalam kapitalisme terletak pada konsep nilai lebih (surplus value), yaitu selisih antara nilai yang dihasilkan buruh dengan upah yang mereka terima. Keuntungan ini dikuasai oleh pemilik modal, sementara buruh hanya mendapat upah sekadar untuk hidup. Kondisi ini membuat hubungan kapitalis-buruh selalu timpang, karena buruh tidak memiliki akses alat produksi dan terpaksa menjual tenaganya. Ketidakadilan tersebut dilegalkan melalui mekanisme pasar dan kontrak kerja yang tampak sah, tetapi sesungguhnya memperkuat dominasi kapitalis. Penelitian Rifai (2021) memperlihatkan bahwa eksploitasi buruh masih berlangsung di berbagai sektor, terutama akibat tekanan kapitalisme global yang menuntut efisiensi biaya. Akibatnya, buruh harus menanggung jam kerja panjang, target tinggi, serta minim perlindungan keselamatan. Hal ini sejalan dengan pandangan Marx bahwa buruh hanya dianggap sebagai alat produksi untuk menciptakan keuntungan kapitalis.

Sementara itu, Rohmawati (2020) menyoroti praktik *outsourcing* dan kontrak kerja di Indonesia. Buruh dalam sistem kerja fleksibel sering kehilangan kepastian status, perlindungan hukum, dan jaminan kesejahteraan, meski tetap dituntut produktif. Eksploitasi modern ini kerap dibungkus dengan istilah efisiensi atau profesionalisme agar terlihat positif, padahal pada dasarnya masih mempertahankan ketidakadilan kapitalistik. Secara keseluruhan, teori Marx tetap relevan digunakan untuk membaca realitas hubungan kerja di Indonesia, baik di sektor tradisional maupun modern. Fenomena seperti upah rendah, ketidakpastian kerja, lemahnya serikat pekerja, hingga praktik kontrak dan *outsourcing* menunjukkan bahwa logika kapitalisme masih mendominasi. Karena itu, pemikiran Marx penting tidak hanya sebagai teori kritis, tetapi juga sebagai dasar dalam mencari solusi untuk mengatasi ketidakadilan dalam dunia kerja saat ini.

### **Teori keadilan sosial dan demokrasi ekonomi menurut Mohammad Hatta (koperasi, tenaga kerja, pembangunan)**

Pemikiran Mohammad Hatta mengenai keadilan sosial dan demokrasi ekonomi berawal dari kritiknya terhadap kapitalisme yang menimbulkan kesenjangan sosial, serta sosialisme otoriter yang membatasi kebebasan individu. Menurut Hatta, sistem yang paling sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia adalah demokrasi ekonomi, yakni sebuah tatanan di mana rakyat memegang peran utama dalam kegiatan ekonomi. Demokrasi ekonomi menolak adanya monopoli maupun praktik eksploitasi, serta menekankan bahwa pengelolaan sumber daya harus diarahkan untuk kesejahteraan bersama. Gagasan ini kemudian dituangkan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi dasar pembangunan ekonomi nasional. Menurut Hatta, koperasi merupakan wujud paling konkret dari demokrasi ekonomi. Koperasi tidak hanya dipandang sebagai lembaga usaha, tetapi juga sebagai sarana pendidikan sosial dan ekonomi yang menanamkan nilai kebersamaan, tanggung jawab, serta kemandirian. Melalui pengumpulan tenaga produktif masyarakat, koperasi mampu menciptakan efisiensi bersama sekaligus melindungi kelompok kecil dari dominasi pemilik modal besar. Atas dasar peran strategis tersebut, Hatta menempatkan koperasi sebagai pilar utama perekonomian Indonesia.

Hatta juga menekankan pentingnya peran tenaga kerja dalam menciptakan keadilan sosial. Buruh tidak boleh hanya dianggap sebagai alat produksi, melainkan sebagai manusia yang memiliki martabat serta hak atas kehidupan yang layak. Oleh karena itu, ia menolak segala bentuk eksploitasi buruh oleh pemilik modal, serta mendorong adanya perlindungan sosial, kebebasan berserikat, dan keterlibatan buruh dalam pengambilan keputusan produksi. Dengan demikian, tenaga kerja dipandang bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek yang turut menentukan arah perekonomian bangsa. Konsep pembangunan menurut

Hatta berakar pada prinsip keadilan. Ia menolak model pembangunan yang hanya menguntungkan perusahaan besar karena berisiko memperdalam kesenjangan sosial. Bagi Hatta, pembangunan seharusnya melibatkan kelompok masyarakat kecil seperti petani, nelayan, dan buruh agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata. Tujuan utamanya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, bukan semata-mata mengejar peningkatan pendapatan negara. Dengan demikian, pemikiran Hatta mengenai keadilan sosial dan demokrasi ekonomi didasarkan pada tiga pilar pokok, yaitu koperasi sebagai sarana ekonomi rakyat, perlindungan tenaga kerja sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia, serta pembangunan yang berkeadilan dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

### **Konsep Industrialisasi (Dari Era Revolusi Industri ke Konteks Globalisasi Saat Ini)**

Pembahasan tentang industrialisasi tidak hanya dipahami sebagai pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke industri, tetapi juga mencakup transformasi struktural yang melibatkan pemanfaatan teknologi, kebijakan pro-industri, akumulasi modal, serta pembangunan kelembagaan yang mampu menghubungkan perekonomian domestik dengan sistem global. Nitisastro menekankan peran penting ilmu pengetahuan, teknologi, dan institusi negara dalam mendorong produktivitas, sementara Thee Kian Wie melihat bahwa jalannya industrialisasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan proteksionis dan strategi investasi yang sarat dengan semangat nasionalisme ekonomi. Menurut Margaretha Pramesti, Fadlan, dan Yasin, industrialisasi merupakan proses modernisasi ekonomi melalui peralihan dari sektor primer ke industri pengolahan yang menghasilkan nilai tambah. Kehadiran Industri 4.0 dengan otomatisasi dan digitalisasi turut membawa perubahan signifikan pada sistem produksi, menjadikannya lebih efisien sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi dunia usaha dan tenaga kerja. Pasca krisis 1998, Ahmad menilai Indonesia belum memiliki strategi industrialisasi yang terpadu. Ia menekankan pentingnya hilirisasi, penguatan UMKM, serta pemberian insentif inovasi agar industri mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Basri menambahkan bahwa liberalisasi perdagangan tanpa kesiapan daya saing domestik berpotensi memicu deindustrialisasi, sehingga kebijakan industri harus diarahkan pada penguatan kapasitas teknologi nasional. Sejalan dengan itu, Brodjonegoro menegaskan perlunya reindustrialisasi yang terarah dengan fokus pada sektor yang berpotensi masuk rantai nilai global serta peningkatan kontribusi industri terhadap PDB untuk menghadapi tantangan globalisasi. Penelitian Elfaki, Handoyo, dan Ibrahim (2021) menunjukkan bahwa industrialisasi, konsumsi energi, dan pengembangan sektor keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Namun, keterbukaan perdagangan dan beberapa aspek pembangunan keuangan justru berdampak negatif, sehingga diperlukan strategi yang lebih hati-hati dalam merancang kebijakan industrialisasi di era global.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan library research dengan sifat kualitatif deskriptif, di mana seluruh data diperoleh melalui penelaahan literatur primer maupun sekunder yang relevan dengan tema penelitian. Data primer berupa karya-karya Karl Marx seperti "*Das Kapital*" dan "*Manifesto Komunis*", serta karya Mohammad Hatta seperti "*Demokrasi Kita dan Membangun Koperasi*". Sedangkan data sekunder meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun skripsi yang membahas teori nilai lebih, eksploitasi tenaga kerja, keadilan sosial, koperasi, dan industrialisasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, dan mencatat gagasan utama

dari sumber yang dikaji sehingga menghasilkan data yang lengkap. Proses analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif dengan pola pikir induktif dan deduktif. Analisis induktif dilakukan dengan cara menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus yang ditemukan dalam teks, sedangkan analisis deduktif dilakukan dengan menguji teori atau konsep umum pada konteks khusus dalam pemikiran tokoh. Dengan teknik ini, penelitian dapat menyajikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana Marx dan Hatta memandang persoalan eksploitasi tenaga kerja serta relevansinya dalam konteks industrialisasi kontemporer.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap pemikiran Karl Marx dan Mohammad Hatta, ditemukan bahwa kedua tokoh memiliki kesamaan dalam mengkritik eksploitasi tenaga kerja yang terjadi dalam sistem industrial kapitalis. Marx menekankan bahwa eksploitasi terjadi melalui pengambilan nilai lebih (*surplus value*) oleh pemilik modal dari hasil kerja buruh, sementara upah yang diberikan hanya cukup untuk mempertahankan hidup (*subsistence wage*) (Kambali, 2020). Hal ini menciptakan hubungan yang timpang dan tidak adil antara borjuis dan proletar. Sementara itu, Hatta juga melihat eksploitasi sebagai akibat dari dominasi modal yang mengabaikan keadilan sosial dan martabat manusia (Wulandari & Hasan, 2023). Meskipun demikian, latar belakang dan solusi yang mereka tawarkan memiliki perbedaan yang signifikan. Marx melihat eksploitasi sebagai bagian inherent dari sistem kapitalisme yang hanya dapat diakhiri melalui revolusi dan penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi. Menurutnya, buruh harus merebut alat produksi untuk menghilangkan ketergantungan pada kapitalis (Kusdiana et al., 2025). Sebaliknya, Hatta tidak menolak industrialisasi secara keseluruhan, tetapi menawarkan alternatif melalui demokrasi ekonomi dan koperasi. Ia percaya bahwa koperasi dapat menjadi wadah untuk mengelola sumber daya secara kolektif, mengurangi ketergantungan pada pemodal besar, dan memastikan distribusi hasil produksi yang adil (Wulandari & Hasan, 2023).

Dalam konteks Indonesia, pemikiran Hatta lebih adaptif karena menawarkan solusi yang konstruktif dan sesuai dengan nilai kebersamaan serta gotong royong yang telah lama hidup dalam masyarakat. Gagasan koperasi dan ekonomi kerakyatan juga sejalan dengan semangat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Sementara itu, pemikiran Marx lebih banyak digunakan sebagai alat kritik terhadap ketimpangan struktural yang masih terjadi hingga saat ini, seperti praktik outsourcing, upah rendah, dan lemahnya perlindungan buruh (Rohmawati, 2020; Reyustina & Legowo, 2023). Berikut adalah tabel perbandingan pemikiran Karl Marx dan Mohammad Hatta mengenai eksploitasi tenaga kerja:

**Tabel 1. Perbandingan Pemikiran Karl Marx dan Mohammad Hatta tentang Eksploitasi Tenaga Kerja**

Aspek	Karl Marx	Mohammad Hatta
Akar Eksploitasi	Sistem kapitalisme dan kepemilikan pribadi alat produksi (Kambali, 2020)	Dominasi modal dan tidak dijalankannya demokrasi ekonomi (Wulandari & Hasan, 2023)
Bentuk Eksploitasi	Pengambilan nilai lebih ( <i>surplus value</i> ) oleh kapitalis (Kusdiana et al., 2025)	Upah tidak layak, jam kerja panjang, lemahnya perlindungan buruh (Wulandari & Hasan, 2023)
Solusi yang Ditawarkan	Revolusi proletar dan penghapusan kepemilikan pribadi (Kusdiana et al., 2025)	Koperasi, demokrasi ekonomi, dan keadilan sosial (Wulandari & Hasan, 2023)
Peran Negara	Negara sebagai alat dominasi kelas yang harus dihapus	Negara harus aktif menjamin keadilan dan melindungi rakyat melalui regulasi
Relevansi dengan Konteks Indonesia	Sebagai pisau analisis kritis terhadap ketimpangan (Reyustina & Legowo, 2023)	Sebagai landasan filosofis sistem ekonomi Indonesia (Pasal 33 UUD 1945)

Kedua pemikiran ini masih relevan untuk menganalisis tantangan industrialisasi di Indonesia saat ini, terutama dalam menghadapi era globalisasi dan Revolusi Industri 4.0. Industrialisasi tidak hanya membawa efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang berkeadilan. Pemikiran Marx mengingatkan kita akan risiko eksploitasi struktural yang terus berlangsung, sementara gagasan Hatta menawarkan jalan tengah melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan koperasi agar industrialisasi tidak hanya menguntungkan segelintir pemodal, tetapi juga membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan kajian komparatif terhadap pemikiran Karl Marx dan Mohammad Hatta, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki titik temu dalam mengkritik eksploitasi tenaga kerja yang muncul akibat sistem kapitalisme industri. Marx menekankan bahwa eksploitasi bersumber dari pengambilan nilai lebih (surplus value) oleh kapitalis, yang mengakibatkan hubungan kerja timpang antara pemilik modal dan buruh. Sebaliknya, Hatta mengkritik dominasi modal yang mengabaikan keadilan sosial dan martabat manusia, sekaligus menawarkan solusi melalui demokrasi ekonomi dan koperasi sebagai wujud nyata dari prinsip kebersamaan serta keadilan distributif. Meskipun terdapat kesamaan dalam kritik, perbedaan mendasar terletak pada solusi yang ditawarkan. Marx menilai bahwa eksploitasi hanya dapat dihapuskan melalui revolusi sosial dan penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi. Hatta, sebaliknya, menghadirkan alternatif yang lebih kontekstual dengan karakter bangsa Indonesia, yakni penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan implementasi demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam konteks kontemporer, pemikiran Marx relevan sebagai perangkat analisis kritis terhadap ketimpangan struktural, praktik upah rendah, serta lemahnya perlindungan buruh dalam era globalisasi dan Revolusi Industri 4.0. Sementara itu, gagasan Hatta tetap aktual sebagai landasan filosofis pembangunan ekonomi nasional yang menekankan kesejahteraan rakyat, partisipasi kolektif, dan distribusi hasil yang adil. Dengan demikian, pemikiran Marx dan Hatta dapat saling melengkapi, di mana Marx berperan sebagai kritik struktural terhadap ketidakadilan, sedangkan Hatta menawarkan jalan konstruktif untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A., Prastio, L. O., & Nur Effendi, S. (2021). Analisis Alienasi Sosial Karl Marx dalam Kebijakan Sistem Pemagangan Nasional Indonesia. *Jurnal Identitas*, 1(2), 48–61. <https://doi.org/10.52496/identitas.v1i2.155>
- Aditiya, N. (2016). Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta 1953-1972 Dan Implementasinya Terhadap Pembelajaran Kelas XII SMA. *Candi: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, 13(1), 53-71.
- Ahmad, M. 2010. *Industrial Policy after the Asian Financial Crisis: The Case of Indonesia*. Jakarta: LIPI Pr
- Arifqi, M. M. A. (2021). Konsep Ekonomi Kerakyatan sebagai Pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia (Telaah Pemikiran Mohammad Hatta). *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 57–73. <https://doi.org/10.35905/balanca.v2i02.1554>.
- Bahri, S. (2023). Ideologi Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta (Jalan Tengah Teori Merkantilisme, Liberalisme dan Marxisme). *Jurnal Masyarakat dan Desa*, 3(2), 124–150. <https://doi.org/10.47431/jmd.v3i2.352>.
- Efendi, R., & Bakhri, B. S. (2018). Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 15(1), 111-135.

- Elfaki, H., Handoyo, L., & Ibrahim, M. (2021). The impact of industrialization, trade openness, financial development, and energy consumption on Indonesia's economic growth (1984–2018). *Economies*, 9(4), 174.
- Hendrawan, D. (2017). Alienasi Pekerja Pada Masyarakat Kapitalis Menurut Karl Marx. *Arete: Jurnal Filsafat*, 6(1). <https://doi.org/10.33508/arete.v6i1.1640>.
- Ilahi, R. P., Zannah, F., Hasibuan, I., & Burhanuddin, M. (2022). Agama sebagai Alienasi dalam Pemikiran Karl Marx: Memandang Agama sebagai Pelarian dari Krisis Ekonomi. *Al-Iqro'*. <https://doi.org/10.54622/aijis.v1i1.259>.
- Kambali, M. (2020). Pemikiran Karl Marx Tentang Struktur Masyarakat(Dialektika Infrastruktur Dan Suprastruktur). *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 8(2), 63–80. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v8i2.154>
- Kusdiana, N. A., Nugraha, S. C., Mahendra, R. A., & Pratama, M. A. (2025). Ekonomi Dan Keadilan Sosial: Telaah Pemikiran Karl Marx Dalam Konteks Kapitalisme Modern. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(1), 1–25. <http://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/936>
- Mubarok, M. S. (2021). *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Islam* (M. T. Abadi, Ed.). Eureka Media Aksara.
- Nitisastro, W. 1989. *Population and Development: Indonesia on the Threshold of the Twenty-First Century*. Singapore: Oxford University Press.
- Nitisastro, W. 1989. *Population and Development: Indonesia on the Threshold of the Twenty-First Century*. Singapore: Oxford University Press.
- Pramesti, M., Fadlan, A., & Yasin, M. (2023). Konsep industrialisasi pada pengembangan teknologi di Indonesia. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(2), 148–154.
- Reyustina, A., & Legowo, M. (2023). Eksploitasi Pada Buruh di PT.Karyamitra Budisentosa. *Jurnal Publique*, 4(1), 23–30. <https://doi.org/10.15642/publique.2024.4.1>
- Rifai, A. (2021). Analisis Teori Karl Marx tentang Nilai Lebih dalam Konteks Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 112–120.
- Rohmawati, N. (2020). Eksploitasi Tenaga Kerja dalam Perspektif Teori Nilai Lebih Karl Marx. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 7(1), 45–56.
- Wulandari, & Hasan, A. (2023). Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta dalam Prespektif Ekonomi Islam(Muhammad Hatta People's Economic Thinking in Islamic Economic Perspective). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3586–3592. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9753>.